

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Penyesuaian tersebut sebagai upaya untuk merespon perkembangan global yang terjadi di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Hal ini disebabkan karena perkembangan lingkungan yang semakin global menuntut peran-peran instansi pemerintah bisa mewadahi semua kepentingan dalam kerangka demokrasi (Irawan, 2017). *Collaborative Governance* adalah pemerintahan yang disusun dengan melibatkan organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah dalam proses pengambilan keputusan secara formal, berorientasi musyawarah mufakat, adapula pembagian peran untuk melaksanakan kebijakan pemerintah atau mengelola program yang dicanangkan oleh pemerintah, serta asset pemerintahan. Berbagai kerja sama antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai suatu usaha dan respon pemerintah dalam kegiatan penanganan masalah publik. Istilah kerja sama antar pemangku kepentingan yang melibatkan

pemerintah, swasta, dan masyarakat dapat diartikan sebagai collaborative governance (Mutiarawati & Sudarmo, 2021).

Collaborative Governance merupakan salah satu cara untuk merespon keinginan para pemegang kepentingan terlibat dalam pelaksanaan pembangunan dan merespon keterbatasan pendanaan pemerintah yang tidak bisa mengikuti perkembangan tuntutan masyarakat akan kinerja pemerintah yang semakin baik, tujuannya untuk mendapatkan sumberdaya guna dalam pelaksanaan pembangunan sesuai harapan para pemegang kepentingan tersebut. Sumber daya tersebut berada dan dimiliki para pemegang kepentingan tersebut (R. Wijayanti, 2016). Kolaborasi ialah sebuah interaksi atau kompromi antar beberapa elemen, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaatnya. Nilai yang menjadi landasan utama adanya kolaborasi yaitu tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat (Rahmawati et al., 2021). Kolaborasi adalah bekerja sama khususnya dalam usaha penggabungan

pemikiran. Hal ini sesuai definisi kolaborasi yakni sebagai jaringan atau distribusi informasi, sumberdaya, aktivitas dan kapabilitas organisasi dalam dua atau lebih sektor untuk bekerjasama mencapai tujuan yang tidak bisa dicapai jika bekerja sendiri-sendiri. Sehingga dalam pelaksanaan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah memerlukan kolaborasi dengan pihak swasta atau pihak pemerintah dalam proses menggabungkan perencanaan kedua pihak (Udiani, 2016).

Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan dapat dioptimalkan melalui perencanaan. Bahkan beberapa ahli seperti Innes dan Booher, Healey, serta Gunton dan Day mengemukakan perencanaan kolaboratif sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara misalnya untuk mengatasi kasus-kasus lingkungan, keamanan, pengelolaan air yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan lintas daerah administratif .Perencanaan telah dibuat oleh pihak pemerintah yang kemudian akan dikolaborasikan dengan perencanaan yang dibuat oleh pihak swasta. Hasil dari perencanaan yang telah disusun oleh kedua pihak kemudian akan dibuktikan apakah ada kesamaan hasil rumusan penyusunan

perencanaan untuk menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan.

Bahkan program kolaboratif yang dirancang dengan baik dapat mengakibatkan kegagalan. Hal ini sering disebabkan oleh keragaman pemangku kepentingan yang terlibat dan kurangnya model atau metode yang sesuai untuk mendukung kepemimpinan untuk meningkatkan proses pembelajaran strategis di antara para aktor yang terlibat, untuk mengelola konflik, untuk membangun kepercayaan, untuk mengejar pandangan bersama, dan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi hasil. Akibatnya, strategi pengarah dan manajemen yang berbeda diperlukan (Bianchi et al., 2021). Ansell dkk mengkonfilasi beberapa prasyarat terciptanya proses kolaborasi, yaitu: (1) Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan, (2) Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, dan (3) Terdapat aktor-aktor yang kompeten (Kamil, 2018).

Sampah menjadi masalah utama yang harus dihadapi oleh daerah, baik itu di kota besar maupun di kota kecil. Kebersihan daerah dari sampah serta pelayanan pengelolaan sampah, oleh

pemerintah merupakan salah satu pembedahan utama yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah. Bertambahnya jumlah penduduk dan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat serta pemerintah dalam suatu pembangunan, merupakan salah satu masalah dalam lingkungan khususnya yang berkaitan dengan meningkatnya produksi sampah (Devita Rizqi Hidayanti, 2020). Sampah merupakan permasalahan yang cukup rumit dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan sampah harus dijalankan dan dikolaborasikan oleh semua pihak, baik itu masyarakat, pemerintah, kelompok organisasi masyarakat maupun swasta. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, agar tidak menimbulkan masalah lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat maupun pemerintah (Pratiwi, 2017).

Pengelolaan sampah secara khusus diatur dalam UU No. 18 Tahun 2018, menjelaskan bahwa pengelolaan sampah diperlukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sampah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, bahkan

menjadi ancaman bagi kesehatan (Ahmad Wahyudi, Rachmanuddin Arief Abdillah, 2020). Alasan mendasar mengakui pengelolaan sampah sebagai wujud dari collaborative governance karena penanganan masalah lingkungan melibatkan pemerintah maupun non pemerintah aktif bekerjasama, ini mencirikan praktek governance. Disamping itu, isu-isu seperti kesepahaman, kepercayaan, kepemimpinan, kelembagaan, komitmen dan sumber daya tampak dalam pengelolaan sampah.

Seiring bertambahnya jumlah penduduk di Tarakan, volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hake Babu juga meningkat. Dari data Unit Pelaksana Teknis (UPT) TPA Hake Babu, volume sampah di Januari lalu rata-rata sudah mencapai 130 ton per hari, Bahkan di bulan April meningkat menjadi 141 ton per hari. Kepala UPT TPA Hake Babu, Abdul Muin menuturkan, rata-rata volume sampah memang mengalami kenaikan setiap bulannya. Beliau menilai peningkatan jumlah sampah ini sudah merupakan hukum alam karena pengurangan sampah tidak maksimal (<https://korankaltara.com> diakses 2022). Produksi sampah yang cukup meningkat di Kota Tarakan mendorong

pemerintah Kota untuk selalu berinovasi. Volume sampah di Kota Tarakan terus bertambah seiring dengan aktivitas dan dinamika kehidupan masyarakat. TPA Hakebabu mencatat pertambahan sampah sebagai berikut: Tahun 2018, sebanyak 117 ton per hari, tahun 2019 menjadi 127 sampai 130 ton per hari, meningkat sekitar 10 ton per hari dalam setahunnya. Sampah yang masuk ke TPA Hakebabu 60% merupakan sampah organik, dan selebihnya nonorganik (Mulyawan & Mahyudin, 2019). Pemerintahan Kota Tarakan terus berusaha mencari inovasi tentang pengelolaan sampah yang lebih efektif dan efisien. Pemerintah Kota Tarakan juga berinovasi dengan membuat program yang diharapkan mampu memberikan dampak positif dan mampu membantu tugas pemerintah dalam pengelolaan sampah, yakni program Sampah “Semesta” (Semua Mesti Terlibat) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah. Sampah “Semesta” telah dijalankan Pemerintah Kota Tarakan sejak 2016.

Program sampah “Semesta” ini dinilai lebih memudahkan masyarakat dalam membuang sampah karena mekanisme

pengelolaannya yang partisipatif di mana alurnya adalah warga menyimpan sampah di depan rumah masing-masing, kemudian akan dijemput petugas di Lingkungan Rumah Tangga (RT), petugas lingkungan tersebut berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditunjuk untuk menjadi petugas pengangkut sampah di lingkungan dan dibiayai melalui iuran bulanan masyarakat per rumah. Sampah yang dikumpulkan oleh petugas pengangkut sampah menggunakan gerobak yang berasal dari bantuan Dinas Lingkungan Hidup, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Tarakan yang menangani permasalahan kebersihan lingkungan dan bantuan dari perusahaan swasta yang berada di Kota Tarakan. Selanjutnya sampah tersebut dikumpulkan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan disebut juga Depo Transfer. Program Sampah “Semesta” ini bertujuan untuk mengajak setiap lapisan masyarakat untuk dapat berkerja sama dan bertanggung jawab, guna menciptakan lingkungan yang bersih dan asri dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan pihak

swasta ini dikoordinatori oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH), selaku penyelenggara program sampah “Semesta”.

Namun Seiring berjalannya program ini, dalam implementasinya dirasakan masih terdapat banyak kendala teknis yang terjadi. Terutama masyarakat yang dibuat sebagai aktor utama dalam pelaksanaan program ini, Sering beberapa rumah warga luput dari jangkauan petugas pengangkut sampah, dengan keadaan seperti ini warga yang sudah membayar merasa tidak adil. Mereka sudah membayar namun petugas pengangkut sampah tidak mengangkut sampah dari rumah mereka. Kemudian, terkadang ada beberapa warga yang juga lambat dalam membayar petugas gerobak pengangkut sampah, sehingga petugas gerobak pengangkut yang seharusnya datang tiap hari pada pukul 14.00-16.00 tidak datang tepat pada waktunya, dan ini menyebabkan sampah di pemukiman warga menjadi menumpuk dan berhamburan (Nurhastuti, Syahrani, 2019).

Selain itu kendala selanjutnya terdapat pada komitmen pemerintah dan sosialisasi terhadap masyarakat, seharusnya dalam program ini memberikan gerobak sampah sebanyak 1000

grobakan akan tetapi hanya 200 gerobak yang terealisasikan. Kemudian anggaran juga menjadi permasalahan dalam program ini pemerintah hanya memberikan anggaran awal sebagai modal selebihnya ditanggung oleh lembaga swadaya masyarakat pada Kelurahan masing-masing. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan terkait permasalahan sampah. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat isu tentang “ semesta “ ini. Penulis ingin meneliti isu tersebut dengan judul : Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Birokrasi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap *Collabotative Governance*: (Studi Kasus Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Dengan *Stakeholders* Dalam Menangani Permasalahan Sampah Tahun 2022).

1.2. Rumusan Masalah

Dari ulasan singkat mengenai latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan suatu rumusan masalah sebagai berikut :

Seberapa besar tingkat Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Birokrasi,

Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap *Collabotative Governance*: (Studi Kasus Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Dengan *Stakeholders* Dalam Menangani Permasalahan Sampah Tahun 2022)?

1.3.Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Maka penelitian ini memuat tujuan, yaitu:

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat pengaruh teknologi informasi dan komunikasi, kepercayaan terhadap pemerintah, birokrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap *collabotative governance*: (studi kasus kerja sama antara dinas lingkungan hidup kota tarakan dengan *stakeholders* dalam menangani permasalahan sampah tahun 2022).

1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Dalam aspek akademik, Sebagai sebuah karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi perkembangan ilmu pemerintahan yang

secara khusus membahas Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Birokrasi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap *Collabotative Governance*: (Studi Kasus Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Dengan *Stakeholders* Dalam Menangani Permasalahan Sampah Tahun 2022).

2. Dalam aspek praktis, Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan serta bisa menjadi bahan bacaan yang menarik bagi masyarakat luas maupun pemerintah, mengenai Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kepercayaan Terhadap Pemerintah, Birokrasi, Akuntabilitas, Dan Transparansi Terhadap *Collabotative Governance*: (Studi Kasus Kerja Sama Antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tarakan Dengan *Stakeholders* Dalam Menangani Permasalahan Sampah Tahun 2022).